

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu diatur lebih lanjut ketentuan hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan penyuluhan pertanian, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terutama kelembagaan dan koordinasi teknis penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Perlu diatur lebih lanjut ketentuan hukum di tingkat Kabupaten Bantul melalui Peraturan Daerah khusus mengenai penyelenggaraan penyuluhan pertanian, sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan perhatian lebih khusus karena dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya hanya membahas secara umum saja mengenai penyelenggaraan penyuluh pertanian.
3. Diatur ketentuan hukum yang mengatur lebih operasional mengenai pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di daerah. Pemerintah daerah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih dalam Sumber Daya Manusia, sistem anggaran dan Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
4. Perlu integrasi yang berkesinambungan antara pemerintah, petani, penyuluh, industri, masyarakat dan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ani Sri Rahayau, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah : Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika : Jakarta

Hans Kelsen dalam Maria Farida Indarti dalam Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., 2017, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika : Jakarta Timur

Jopie Jusuf, 2008, *Analisis Kredit*, ANDI : Yogyakarta

Koeniatmanto Soetoprawiro, 2013, *Pengantar Hukum Pertanian*, GAPPERINDO : Jakarta

Soebono Wirjosoegito, 2004, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Ghalia Indonesia : Jakarta

Tony Djogo, Sunaryo, Didik Suharjito dan Martua Sirait, 2003, *Bahan Ajar Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*, World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Office : Bogor

W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta

Winkel, 1991, *Psikologi Pengajaran*, Jakarta : Gramedia

Jurnal :

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, *Masalah Rawan dalam Hubungan Industrial dan Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. II No. 02 Edisi Juli-Desember 2016

Dandi Septian dan Gabriel Cahya Anugrah, *Perlindungan Petani melalui Konsep Asuransi Pertanian pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul*, Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2, 2014, Program Studi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Dyah Candra Dewi, *Kebijakan Pertanian yang Memarjinalkan Petani dan Meruntuhkan Kedaulatan Pangan*, Jurnal Vol. 18 No.1, 2014, Peneliti di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta

Eri Susan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 9, No.2, 2019, ADAARA

Sabaruddin, 2008, *Studi Difusi Informasi Hubungan antara Penyebaran Penyebaran Informasi dengan Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Nelayan dalam Pelestarian Terumbu Karang di Kabupaten Pangkep*, Universitas Hasanuddin : Makassar

Tri Prasetyo R dan Fatihunnadha Zamzam A, *Makalah Penyusunan Program dan Anggaran*, Universitas Brawijaya : Malang, 2016

Artikel dalam Artikel :

Rustaman, 2001, “*Keterampilan Bertanya dalam Pembelajaran IPA.*” Dalam Handout Bahan Pelantikan Guru-Guru IPA SLTP se-Kota Bandung di PPG IPA, Depdiknas : Jakarta

Internet :

<https://kbbi.web.id/biaya>, diakses pada 6 Oktober 2021.

<https://kbbi.web.id/operasional>, diakses pada 6 Oktober 2021.

<https://kbbi.web.id/sumber> , diakses pada 6 Oktober 2021.

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/7189>, diunduh pada 27 Oktober 2021.

<https://tabloidsinartani.com/detail/industri-perdagangan/nasional/13795-Presiden-Jokowi-Ketok-Palu-Bakorluh-Resmi-Bubar>, diunduh pada 30 Desember 2021.

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/895>, diunduh pada 27 Desember 2021.

M. Iqbal Al Machmudi, Indonesia Peringkat Ketiga Penghasil Beras Terbesar di Dunia, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/393247/indonesia-peringkat-ketiga-penghasil-beras-terbesar-di-dunia>, diakses pada 21 September 2021.

Taufiq Hidayatullah dan Leoni Alvionita, 2020, *Usia Petani menua, Jokowi ajak anak muda tekuni pertanian organik*, <https://lokadata.id/artikel/usia-petani-menua-jokowi-ajak-anak-muda-tekuni-pertanian-organik>, diunduh pada 27 Desember 2021.

<https://www.bps.go.id/indicator/6/1171/1/persentase-tenaga-kerja-informal-sektor-pertanian.html> , diakses pada 23 September 2021.

<https://kbbi.web.id/fasilitas>. diunduh pada 30 November 2021.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah